



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KURNIAWAN HARY PUTRANTO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 778110

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.280.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/123 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 1.280.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 607.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA 90Z Tahun 1971, WARISAN Rp. 1.000.000
3. MOTOR, SUZUKI RU 120 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER 2.4 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 25.800.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 508.494.902

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.421.294.902

**III. HUTANG** Rp. 153.960.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.267.334.902

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.